

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang artinya pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini di tunjukkan dengan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja di sektor pertanian (Rahmadani, 2017). Peran sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Sektor ini mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Di antara kelima subsektor tersebut, subsektor tanaman pangan memiliki peran penting karena menyediakan bahan pangan utama bagi masyarakat untuk menunjang kelangsungan hidup. Pertanian tanaman pangan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu pertanian padi dan palawija. Pengembangan tanaman padi saat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional. Hal tersebut dilakukan untuk menekan impor beras yang terjadi di Indonesia (Sulaiman dan Rasmahwati, 2018).

Tanaman pangan adalah bagian penting dari pembangunan Indonesia dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, tanaman pangan memiliki potensi untuk berdampak pada stabilitas suatu negara, sehingga sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam hal ekonomi, budaya, dan politik. Padi merupakan tanaman pangan yang memiliki peran dan manfaat penting bagi kelangsungan hidup yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh (Pratiwi, 2016).

Padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat. Padi adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat dimana kebutuhan beras terus meningkat karena peningkatan jumlah konsumen tidak diimbangi dengan produksi yang cukup. Padi sebagai komoditas pangan utama yang mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya penanganan serius dalam upaya peningkatan produktivitasnya. Upaya tersebut tidak terlepas dari besarnya peranan pemerintah dalam menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung operasional petani dalam budidaya tanaman padi (Anggraini, dkk. 2013).

Salah satu cara pemerintah dalam membantu perkembangan pertanian adalah dengan melakukan pembentukan kelembagaan atau kelompok tani dalam kehidupan masyarakat petani. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas padi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan padi dalam Negeri dan sebagai upaya untuk menekan impor beras. Berikut ini adalah data Produksi padi dan Luas Panen di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Produksi Padi dan Luas Panen Padi Nasional 2019-2023

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	2019	10.677.887,15	54.604.033,34
2	2020	10.657.274,96	54.649.202,24
3	2021	10.411.801,22	54.415.294,22
4	2022	10.452.672,00	54.748.977,00
5	2023	10.213.705,17	53.980.993,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa data produksi padi dari tahun 2019 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan dalam presentase yang kecil, akan tetapi pada tahun 2023 terlihat mengalami penurunan yang signifikan sekitar 1,40% dari tahun 2022. Penyebab penurunan produksi padi ini disebabkan oleh

berbagai faktor, salah satunya adalah menurunnya lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa luas panen padi dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 10.677.887,15 Ha pada tahun 2019 menjadi 10.213.705,17 pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik 2023).

Pertanian padi di Indonesia menghadapi kendala serius yang menghambat produktivitas padi. Suryana et al., (2009) mengungkapkan bahwa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan usahatani padi sawah antara lain: (a) kepemilikan lahan usahatani yang relatif kecil dan tersebar dan bahkan cenderung mengecil karena adanya proses fragmentasi lahan sebagai akibat dari sistem/pola warisan, (b) keterbatasan debit air irigasi pada beberapa wilayah, terutama pada musim kemarau yang disebabkan oleh persaingan dalam penggunaan air irigasi, (c) keterbatasan tenaga kerja terutama pada saat panen raya, sehingga kebutuhan tenaga kerja umumnya berasal dari luar Bali, (d) keterbatasan modal usahatani, sehingga produktivitas yang dicapai masih dibawah produktivitas potensialnya (e) tingkat serangan hama penyakit yang masih cenderung tinggi dan beragam antar wilayah dan antar musim tanam seperti wereng coklat, penggerek batang, tungro dan tikus dan (f) terjadinya alih fungsi lahan sawah untuk penggunaan lainnya sebagai akibat perkembangan perekonomian daerah baik untuk pariwisata, perumahan maupun sektor lainnya.

Alih fungsi lahan atau disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan

atau penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan hal yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. (Sulistyawati, 2014:9).

Dampak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional (Nasution.2015). Alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pemukiman, industri, atau infrastruktur, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Sitorus (2008), salah satu dampak utama adalah degradasi kualitas lingkungan, seperti peningkatan erosi tanah dan berkurangnya kapasitas resapan air, yang dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, alih fungsi lahan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati karena habitat alami hewan dan tumbuhan terganggu atau bahkan hilang (Sukmana, 2011). Dari perspektif sosial ekonomi, Sumarmi (2012) menekankan bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat mengurangi ketahanan pangan masyarakat lokal karena berkurangnya lahan produktif untuk pertanian. Hal ini juga dapat menyebabkan migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang selanjutnya memicu masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di kota-

kota besar.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian sangat mempengaruhi tingkat produksi dan penyediaan pangan di Bali pada khususnya dan Nasional pada umumnya. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi alih fungsi lahan yang merugikan, dengan tujuan melestarikan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Salah satu upaya utama adalah penerapan peraturan dan kebijakan yang lebih ketat terkait penggunaan lahan. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah mengatur pemanfaatan lahan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan konservasi lingkungan (Kementerian ATR/BPN, 2010).

Program Subak Lestari merupakan inisiatif yang dirancang untuk melestarikan sistem irigasi tradisional Bali yang dikenal sebagai "subak." Subak bukan hanya sistem pengairan, tetapi juga bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali. Program ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan subak dalam menghadapi tekanan modernisasi dan alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Salah satu upaya utama dalam Program Subak Lestari adalah memberikan insentif kepada petani untuk tetap mengelola lahan pertanian mereka dan tidak menjualnya untuk kepentingan pembangunan non-pertanian. Insentif ini dapat berupa bantuan finansial, subsidi pupuk, atau pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Windia, 2012). Selain itu, pemerintah daerah Bali juga menerapkan peraturan ketat terkait penggunaan lahan, termasuk zonasi lahan yang melarang alih fungsi lahan pertanian produktif

menjadi lahan non-pertanian (Pitana, 2014).

Program subak lestari juga melibatkan penguatan kelembagaan subak, termasuk pembentukan kelompok tani dan peningkatan kapasitas manajemen pengelola subak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola lahan mereka secara efektif dan berkelanjutan (Suryawan, 2016). Lebih lanjut, program ini mendorong pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek-aspek budaya subak sebagai daya tarik wisata, sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan kepada masyarakat tanpa merusak lingkungan (Yudana, 2018). ). Alih fungsi lahan di Kota Denpasar telah menjadi isu yang signifikan seiring dengan pesatnya urbanisasi dan perkembangan infrastruktur. Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang memicu peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas komersial, dan infrastruktur publik. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang sebelumnya subur dan produktif diubah menjadi kawasan pemukiman dan komersial (Windia, 2012). Proses alih fungsi lahan ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan pertanian lokal, mengurangi lahan hijau, dan mengancam sistem subak yang merupakan warisan budaya dan sistem irigasi tradisional Bali. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penerapan Program Subak Lestari yang bertujuan untuk melestarikan sistem subak dan mengurangi laju alih fungsi lahan melalui pendekatan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Subak Sembung merupakan salah satu subak dalam upaya pelestarian sistem irigasi tradisional di tengah perkembangan urbanisasi di Kota Denpasar. Terletak di Kelurahan Peguyangan, Subak Sembung telah berhasil

mempertahankan fungsinya sebagai subak lestari meskipun berada di kawasan yang terus berkembang. Subak ini menonjol karena upaya komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan budaya tradisional Bali di tengah tantangan alih fungsi lahan. Program Subak Lestari di Subak Sembung mencakup berbagai inisiatif, seperti pemberian insentif finansial dan pelatihan teknis kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengorbankan lingkungan. Pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan lembaga adat setempat untuk menerapkan peraturan zonasi yang ketat, yang melarang perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian. Selain itu, Subak Sembung juga menjadi pusat pendidikan dan wisata ekologis, di mana masyarakat dan wisatawan dapat belajar tentang sistem subak dan pentingnya pelestarian lingkungan (Suryawan, 2016).

Pemerintah memberikan dukungan signifikan untuk pengembangan Ekowisata Subak Sembung di Munduk Palak, baik melalui bantuan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pembangunan jalur trekking, fasilitas pendukung seperti tempat istirahat dan papan informasi, serta pelatihan bagi petani dan warga lokal untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan wisata berbasis lingkungan. Selain itu, pemerintah juga aktif mempromosikan Subak Sembung sebagai destinasi ekowisata, sehingga menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian subak sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut (Widana 2023)

Pemerintah dapat memperluas bantuan dari Munduk Umapalak Subak

Sembung ke munduk-munduk lainnya di kawasan Subak Sembung dengan mengintegrasikan program pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya secara menyeluruh. Langkah ini meliputi penyediaan infrastruktur dasar seperti jalur trekking antar-munduk, pembangunan fasilitas publik, dan penerangan yang merata di setiap area. Selain itu, program pelatihan bagi komunitas lokal di semua munduk dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola potensi wisata dan pertanian organik. Pemerintah juga bisa menggalakkan konservasi lingkungan dengan penghijauan serta pelestarian subak secara terpadu, sambil mempromosikan kawasan Subak Sembung sebagai destinasi ekowisata berbasis komunitas yang utuh. Dengan pendekatan ini, manfaat pariwisata berkelanjutan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di kawasan tersebut (Widana 2023)

Subak Sembung telah berkembang menjadi destinasi pariwisata berbasis ekowisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Wisatawan dapat menikmati keindahan sawah yang hijau, belajar tentang sistem irigasi subak, dan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian tradisional. Subak Sembung juga menyediakan jalur trekking dan bersepeda yang memungkinkan pengunjung untuk mengeksplorasi lanskap pertanian yang indah sambil memahami pentingnya pelestarian lingkungan (Suryawan, 2016).

Ekowisata di Subak Sembung tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi budaya dan lingkungan. Festival subak dan acara budaya lainnya sering diadakan untuk merayakan dan mempromosikan warisan budaya Bali. Melalui pendekatan yang menggabungkan pelestarian lingkungan, penguatan

ekonomi lokal, dan pelestarian budaya, Subak Sembung berhasil menunjukkan bahwa sistem subak tradisional dapat bertahan dan berkembang di era modern.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Persepsi Petani Mengenai Program Ekowisata Subak Sembung Sebagai Subak Lestari Untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”. Tujuannya adalah untuk mengukur pengaruh program subak terhadap pertanian berkelanjutan”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana persepsi petani mengenai program Subak Sembung sebagai subak lestari?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan program subak lestari?

## **1.3 TUJUAN**

1. Untuk mengetahui persepsi petani mengenai program subak lestari yang sudah diterapkan di Subak Sembung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program subak lestari di Subak Sembung.

## **1.4 MANFAAT**

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber yang bermanfaat bagi pembaca, penyuluh pertanian, mahasiswa dan peneliti di kalangan akademis yang berhubungan dengan pertanian dan ekowisata. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan bagi ilmu pengetahuan mengenai ekowisata dan pertanian berkelanjutan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan, bahan kajian dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperhatikan ekowisata berbasis Subak untuk mendukung kelestarian subak dan pertanian berkelanjutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PERSEPSI**

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi memengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indra. Persepsi merupakan salah satu aspek penting bagi tiap individu saat merespon aspek atau gejala yang muncul dari lingkungan sekitar. Persepsi individu demikian penting karena berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perubahan sikap dan perilaku petani harus didahului dengan perubahan persepsi (Kusrini, 2017).

#### **2.2 PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dijelaskan bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di

bidang pertanian melalui sistem budidaya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya secara optimal guna menghasilkan produk panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang wajar, mampu memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan dan produktivitas sumberdaya sepanjang masa (Sumarno, 2018; Rachmawatie et al., 2020).

Pertanian berkelanjutan secara umum berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan bahan tanaman untuk usaha produksi bersifat lestari menghasilkan produk pertanian secara ekonomis dan menguntungkan. Ahli Agronomi memaknai pertanian berkelanjutan berarti usaha pertanian dapat dilaksanakan pada sumberdaya lahan yang bersangkutan secara terus-menerus dan menguntungkan. Ahli lingkungan menghendaki pertanian berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian mutu lingkungan, keseimbangan agroekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Pelaku pasar memaknai pertanian berkelanjutan sebagai usaha pertanian yang mampu memasok produk bermutu tinggi, aman konsumsi, stabil dan kontinyu sepanjang masa. Bagi petani, memaknai usaha pertanian berkelanjutan sebagai usaha produksi yang mampu menghasilkan produk secara stabil dan optimal, dengan masukan sarana produksi yang relatif rendah serta hasil jual produk memberikan keuntungan ekonomis yang layak bagi kehidupan keluarga. Walaupun dimensi cakupan kepentingan

pertanian berkelanjutan oleh empat golongan masyarakat tersebut berbeda, namun ke empatnya menekankan terjaminnya kelestarian fungsi sumberdaya lahan dan lingkungan.

### **2.3 SUBAK LESTARI**

Subak adalah sistem irigasi tradisional di Bali yang mengintegrasikan konsep sosial-religius dengan agraris. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, Subak didefinisikan sebagai organisasi tradisional yang mengelola tata guna air dan tanaman di tingkat usaha tani masyarakat adat Bali, dengan aspek sosio-agraris, religius, dan ekonomis. Subak merupakan organisasi petani yang menggunakan air dari sumber yang sama, memiliki Pura Bedugul, dan memiliki otonomi penuh dalam mengurus kepentingan internal dan berhubungan dengan pihak luar. Sebagai sistem irigasi kolektif, Subak melibatkan anggota dalam pengelolaan air dan lahan serta pelaksanaan ritual keagamaan terkait siklus pertanian (Yulianto et al., 2021).

Subak lestari adalah konsep pelestarian sistem irigasi tradisional Bali yang dikenal sebagai subak, yang bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi dari subak itu sendiri. Menurut Windia (2013), subak lestari adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan sistem subak agar tetap berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan modernisasi dan tekanan alih fungsi lahan. Windia menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional dan budaya dalam sistem subak, serta mengintegrasikan teknologi modern yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sukartha (2015) juga menjelaskan bahwa subak lestari mencakup pengelolaan sumber daya air yang efisien, praktik pertanian berkelanjutan, dan partisipasi aktif

masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola lahan pertanian mereka. Sukartha menyoroti bahwa pelestarian subak bukan hanya tentang mempertahankan sistem irigasi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat petani. Program Subak Lestari melibatkan berbagai pendekatan, termasuk edukasi dan pelatihan bagi petani, penerapan peraturan zonasi yang ketat, dan pengembangan ekowisata yang memanfaatkan potensi budaya dan keindahan alam subak (Suryawan, 2016). Melalui pendekatan ini, subak lestari diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan budaya Bali.

#### **2.4 EKOWISATA**

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang ditunjukkan dengan adanya perhatian terhadap gaya hidup dan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Peran aktif dalam pengelolaan potensi wisata sangat krusial, di mana pengetahuan mengenai alam dan budaya lokal bernilai komersial sebagai nilai tambah bagi ekowisata. Berkembangnya ekowisata juga erat terkait dengan warga lokal dalam hal ekologi, sosial, dan ekonomi, menggambarkan hubungan yang saling mempengaruhi antara pengembangan wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata, ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Atraksi ekowisata di subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan keindahan alam, warisan budaya, dan praktik pertanian berkelanjutan. Wisatawan dapat mengikuti tur sawah dengan panduan petani lokal untuk mempelajari cara kerja irigasi subak dan manajemen air yang bijak. Aktivitas menanam dan memanen padi memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan pertanian di Bali. Pengunjung juga dapat menjelajahi hamparan sawah hijau yang indah dengan terasering yang spektakuler. Beberapa tempat menawarkan workshop pembuatan makanan tradisional Bali dari bahan organik subak. Interaksi dengan komunitas lokal memperkaya pengalaman dengan nilai-nilai kearifan lokal dan harmoni hidup masyarakat Bali. Atraksi ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga mendukung pelestarian tradisi pertanian dan lingkungan setempat (UNESCO World Heritage Centre, 2012).

## **2.5 KERANGKA PEMIKIRAN**

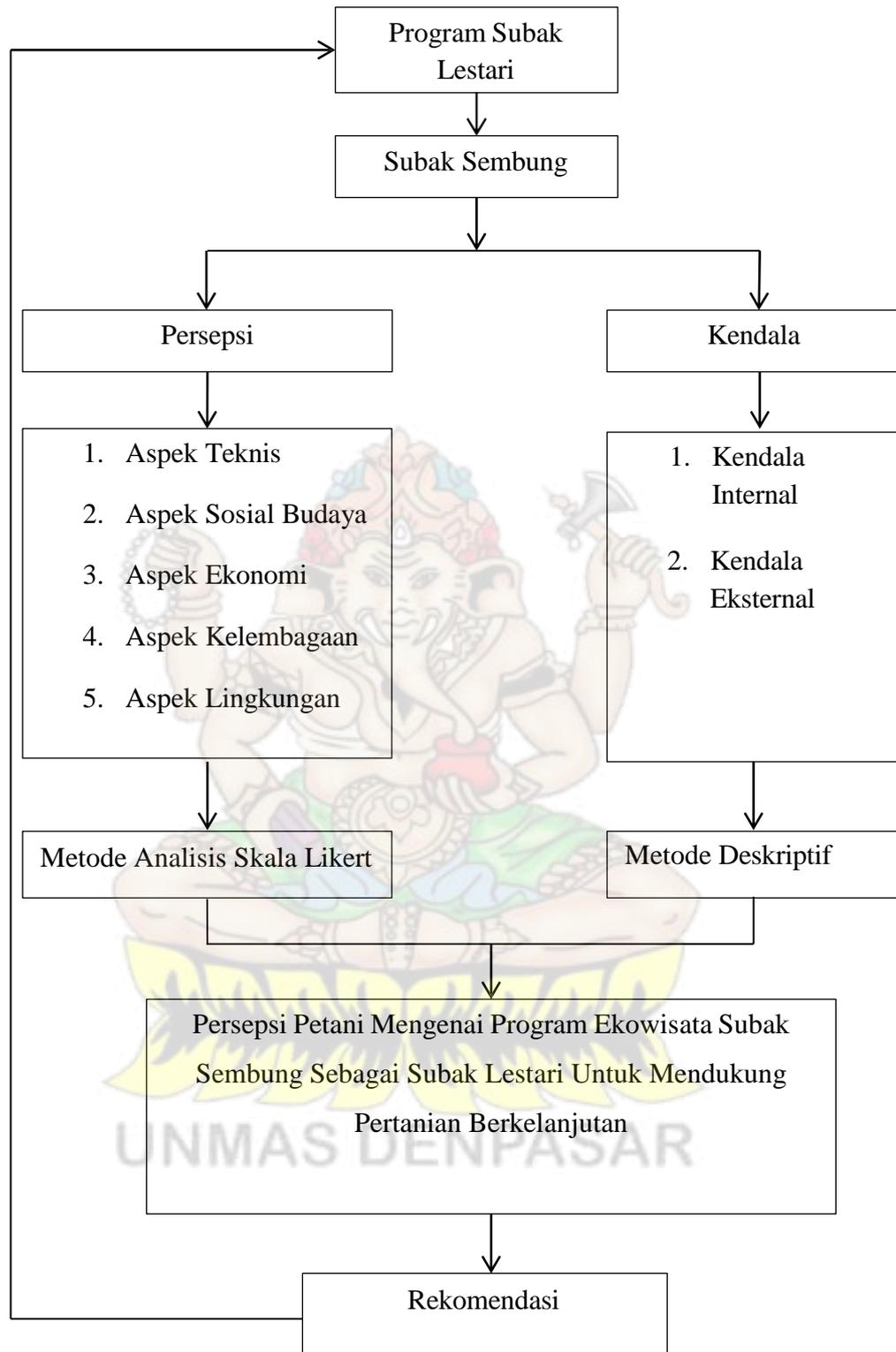
Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang akan dilakukan terkait persepsi petani terhadap program Subak Lestari di Subak Sembung dan bagaimana program ini mendukung pertanian berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci dari kerangka berpikir tersebut: Objek utama dari penelitian ini adalah program Subak Lestari, ini adalah titik awal dari kerangka berpikir yang menunjukkan program yang akan dievaluasi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu subak yang terletak di kota Denpasar, yaitu Subak Sembung. Dalam penelitian terdapat dua Variabel yaitu Persepsi dan Kendala.

Pertama, Variabel Persepsi dalam penelitian memiliki 5 Indikator yang

akan dicari, yaitu: Aspek Teknis, Aspek Sosial Budaya, Aspek Ekonomi, Aspek Kelembagaan dan Aspek Lingkungan. Indikator dari Variabel ini diukur menggunakan Metode Skala Likert. Kedua, Variabel Kendala dalam penelitian ini yaitu Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Metode yang digunakan untuk menganalisis kendala dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Petani Mengenai Program Ekowisata Subak Sembung Sebagai Subak Lestari Untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi akan diberikan untuk perbaikan dan pengembangan program kedepan.





Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

## 2.6 PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Persepsi Petani terhadap Penetapan Subak Anggabaya Sebagai Subak Lestari di Kota Denpasar, 2020. I GUSTI AYU WINDI PRAMESTI, I KETUT SUAMBA	Metode Skorsing menggunakan Skala Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar petani memiliki pengetahuan yang baik tentang konsep Subak Lestari dan pentingnya pelestarian lingkungan.</li> <li>Petani menunjukkan sikap positif dan mendukung penetapan Subak Anggabaya sebagai Subak Lestari, karena mereka menyadari manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan pertanian mereka.</li> </ol>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Fokus Penelitian: Keduanya meneliti persepsi petani terhadap program yang terkait dengan penetapan subak sebagai Subak Lestari.</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Lokasi penelitian dari kedua penelitian ini berbeda, yaitu, subak Anggabaya dan Subak Sembung.</p>
2	Peran Subak Dalam Optimalisasi Pengembangan Agrowisata Subak Kualon di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Pande Putu Ivan Witdi Kardana Putra, Putu Fajar Kartika Lestari, Luh Putu Kirana Pratiwi. Tahun 2023	Metode analisis data yang digunakan adalah skala likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peran Subak memiliki rata-rata persentase 73,70% dan dikategorikan baik. Aspek teknis pertanian mendominasi dengan 79,72%, diikuti oleh aspek sosial budaya (74,20%), lingkungan (72,34%), dan ekonomi (71,77%).</li> <li>Potensi Subak memiliki rata-rata persentase 73,37% dan dikategorikan baik. Konsep accessibility memiliki persentase tertinggi (83,04%), diikuti oleh attraction (72,00%), amenity</li> </ol>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian 1: Fokus pada optimalisasi agrowisata, termasuk analisis peran subak dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan wisata.</p> <p>Penelitian 2: Fokus</p>

		(71,94%), dan ancillary (68,51%).	pada persepsi petani terhadap program ekowisata sebagai alat untuk mendukung pertanian berkelanjutan, dengan penekanan pada pelestarian lingkungan dan budaya.
3	Green Movement” di Ekowisata Subak SembungDesa Peguyangan, Kecamatan Denpasar UtaraKota Denpasar. Gusti Ketut Indra Pranata Darma dan kawan-kawan, 2023	Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani anggota subak, pengelola ekowisata, pengunjung, dan pihak terkait lainnya, serta melalui observasi lapangan dan analisis dokumen.	<p>Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata Subak Sembung Peguyangan sangat dipengaruhi oleh gerakan hijau. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan budaya lokal dapat dicapai melalui aktivitas seperti pengelolaan limbah, konservasi alam, edukasi lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, gerakan hijau membantu menciptakan kesempatan ekonomi baru dengan membangun bisnis berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat. Untuk melestarikan lingkungan dan budaya Subak Sembung Peguyangan, ekowisata dan gerakan hijau dapat bekerja sama dengan baik. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat memastikan bahwa ekowisata akan terus berkembang dengan prinsip keberlanjutan yang kuat dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat lokal</p> <p><u>Persamaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedua penelitian berfokus pada Subak Sembung di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar</li> <li>2. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode seperti wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data.</li> </ol> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian 1: Fokus pada analisis implementasi Green Movement di ekowisata Subak Sembung dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.</p> <p>Penelitian 2: Fokus pada persepsi petani</p>

			dalam jangka panjang.	terhadap program ekowisata di Subak Sembung sebagai bagian dari upaya menjadikannya Subak Lestari untuk mendukung pertanian berkelanjutan.
4	Implementasi Filsafat Tri Hita Karana untuk keberlanjutan Subak Anggabaya sebagai Subak Lestari Di Kota Denpasar. Putu Udayani Wijayanti dan Wayan Windia 2021.	Metode untuk mendapatkan data adalah melalui responden/informan, dengan wawancara mendalam. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif	Subak Anggabaya di Kota Denpasar, masih tetap melaksanakan penerapan konsep Tri Hita Karana, yakni dengan melaksanakan kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Penerapan konsep Tri Hita Karana ini dapat digunakan sebagai indikator keberlanjutan subak tersebut	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Objek penelitian ini sama-sama meneliti tentang subak.</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Perbedaan antara keduanya adalah, lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian berbeda.</p>
5	Sinergitas Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia ( Studi Kasus : Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). Komang Trisna Febriantini, Ni Kadek Indriani, Bima Oktadinata Kusuma, Ni Komang Yuli Yuniari.	Dianalisis menggunakan metode deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi internal dan eksternal dalam perencanaan dan pembinaan sudah optimal, tetapi terdapat masalah dalam komunikasi antara Pemerintah Desa Jatiluwih dan lembaga lainnya.</li> <li>2. Koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga Subak untuk pembangunan berkelanjutan Subak Jatiluwih masih belum maksimal karena bantuan fasilitas dan dana belum sepenuhnya terealisasi.</li> </ol>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Keduanya mengeksplorasi kontribusi Subak dalam konteks pembangunan berkelanjutan, meskipun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda.</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian pertama fokus pada sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan Subak di Subak Jatiluwih, sementara penelitian kedua lebih menitikberatkan pada persepsi petani terhadap program ekowisata Subak Sembung.</p>